

BAB 1

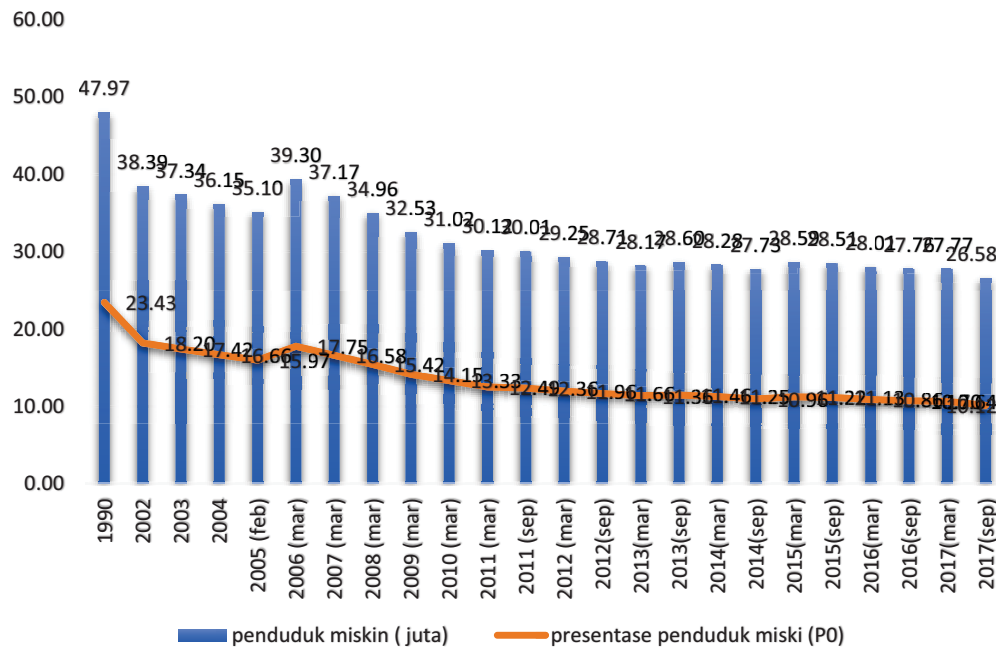
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara didunia mempunyai permasalahan kemiskinan yang dihadapi. Indonesia dalam memandang dan mendefinisikan kemiskinan melalui Badan Pusat Statistik (2018) memakai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai konsep untuk mengukur kemiskinan yang terjadi di Indoneisa. Masyarakat yang bila dipandang dari sisi ekonomi tidak memiliki kemampuan dalam upaya mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (kebutuhan pokok) yang dapat ukur dari sisi pengeluaran individu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan atau menghitung presentase penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk atau yang biasa disebut *headcount index*. Indonesia berupaya mengurangi kemiskinan yang saat ini dihadapi, dimana setiap provinsi memiliki presentase penduduk miskin yang berbeda-beda, bahkan beberapa provinsi memiliki presentase yang cukup tinggi, pemerintah menghadapi banyak tantangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyebab kemiskinan tidak dapat disebutkan dan dijelaskan secara tunggal, sehingga dalam mengatasi kemiskinan perlu adanya solusi yang berkelanjutan serta menyeluruh.

Permasalahan kemiskianan yang terjadi di Indoneisa bukaan hanya sekedar tentang jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin. Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan dari kemiskinan itu adalah dimensi lain yang perlu diperhatikan. Rata-rata pengelusran penduduk miskin yang cenderung menjauhi garis kemiskinan menjadi indikasi dari indeks kedalaman kemiskinan. Sementara itu, ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara pendduk miskin menjadi indikasi dari indeks keparahan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2018).

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia Beberapa variabel memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dari ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan hanya variabel Indeks pembangunan manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi yang ada tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, hal itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang berkualitas dan pada akhirnya tidak mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Tingkat pengangguran terbuka juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur belum tentu memiliki pendapatan yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia (IPM)(Zuhdiyaty & Kaluge, 2018)



Gambar 1.1

Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Badan Pusat Statistik (2018) menjelaskan pada periode tahun 1999 sampai September 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia baik dari sisi jumlah ataupun presentase mengalami penurunan, meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2006, 2013 serta tahun 2015. Naiknya harga barang kebutuhan pokok yang diakibatkan oleh naiknya bahan bakar minyak menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di Indonesia. Gambar 1.1 menampilkan perkembangan tingkat kemiskinan pada periode 1999 sampai dengan September 2017. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) pada bulan September 2017 di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 %. Jumlah tersebut jika dibandingkan pada kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 % mengalami penurunan sebesar 1,19 juta orang.

Kemiskinan rumah tangga yang diukur dengan pendapatan per kapita memiliki dampak buruk baik pada penyelesaian sekolah menengah maupun pada kelanjutan sekolah, pendapatan orang tua yang lebih rendah berarti kualitas pendidikan yang lebih rendah untuk anak-anak (Knight dkk., 2009). Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya dalam melakukan pengurangan kemiskinan. dalam upaya peningkatan modal manusia untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah telah membuat berbagai program pengentasan kemiskinan diantaranya melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Maizunati, 2018). Program yang dijalankan pemerintah tentang peningkatan Pendidikan Sebagian besar dapat dikatakan berhasil, seperti yang dijelaskan Suprastowo (2014) dimana Kebijakan dalam rangka peningkatan pemerataan serta perluasan akses terhadap Pendidikan yang bermutu dapat terwujud karena program BSM dapat berkontribusi positif pada keberlangsungan serta keberlanjutan pendidikan siswa. Bantuan siswa miskin (BSM) memiliki pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan Pendidikan melalui penurunan angka partisipasi murni (APM) serta Angka partisipasi kasar (APK). Badan Pusat Statistik (2019) menyebutkan terdapat program Indonesia pintar (PIP). PIP merupakan bantuan tunai Pendidikan yang salurkan kepada seluruh anak-anak yang masih usia sekolah antara 6 sampai 21 tahun, dimana

terdapat persyaratan harus memiliki kartu Indonesia pintar (KIP) atau pelajar yang berasal dari keluarga miskin serta rentan (contohnya adalah keluarga atau rumah tangga yang terdaftar dalam program kartu keluarga sejahtera atau KKS) serta anak-anak atau pelajar yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia pintar atau KIP adalah program lanjutan yang menyempurnakan program terdahulu yaitu bantuan siswa miskin (BSM) sejak akhir tahun 2014.

Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional dimana demi mencapai suasana belajar serta proses belajar mengajar agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi diri individu agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri, dan keterampilan yang nantinya diperlukan untuk masing-masing individu, masyarakat, bangsa serta negara maka Pendidikan dijadikan sebuah usaha dasar dan terencana.

Pendidikan adalah salah satu alat mobilitas vertikal paling penting. Itu artinya dengan Pendidikan seorang individu dapat keluar dari kemiskinan seiring dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan yang didapat dari pengembalian investasi Pendidikan yang dilakukan. Sebagai hak-hak dasar terhadap masyarakat miskin, Langkah-langkah perluasan serta pemerataan akses terhadap Pendidikan walaupun tidak berhubungan langsung terhadap tingkat kesejahteraan seseorang. Kehidupan yang lebih baik dimasa depan dan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dapat tercapai apabila masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan posisi ekonomi, jika asset berupa modal materiil tidak dimiliki maka Pendidikan menjadi investasi yang layak dan dapat menjadi kesempatan seseorang untuk berkompetisi. Mata rantai kemiskinan di Indonesia dapat dipotong dengan efektif melalui Pendidikan sebagai instrumennya, yaitu Pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua orang (*education for all*). Pendidikan yang bermutu menjadikan seseorang mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan karena setiap orang akan memiliki bekal pengetahuan serta keterampilan sehingga menjadikan seseorang yang tadinya kurang produktif menjadi produktif dan pada

akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Pendidikan pada akhirnya akan menaikkan kualitas hidup serta akan mmemcapai kesejahteraan masyarakat karena dengan Pendidikan seseorang mampu memutus mata rantai kemiskinan serta menghilangkan eksklusi sosial (Ustama, 2010).

Masyarakat dalam mengurangi kemiskinan serta kerentanan memiliki slaah satu instrument yang paling kuat yaitu Pendidikan. Peran Pendidikan secara langsung yaitu memeberikan pengetahuan serta keterampilan, sehingga dalam meningkatkan produktivitas serta menciptakan akses seseorang pada lapangan kerja. Kemiskinan dan kelaparan dapat berkurang dengan adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh individu. Kemampuan manusia dipercaya dapat dibentuk dari Pendidikan, dimana Pendidikan memiliki peran penting untuk mencapainnya. Pendidikan juga menjadi sarana Suatu negara dalam menyerap serta menciptakan teknologi yang modern dan mengembangkan kapasitas untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi. (Todaro & Smith, 2006). Program Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan, program wajib belajar 9 tahun yang lakukan pemerintah pada tahun 2015 diubah menjadi program wajib belajar 12 tahun, selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan program KIP. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,84 persen, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dan melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, Pemerintah menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat peta jalan pengembangan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (*link and match*).

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara angkatan kerja baru juga tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidaktersediaan lapangan kerja baru. Selanjutnya, pandemi COVID-19

juga menyebabkan penurunan pendapatan yang diikuti meningkatnya jumlah penduduk miskin (Coibion et al., 2020). Pandemi covid menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap kemiskinan di perkotaan, sementara di pedesaan tidak signifikan (Rosmiati Sani et al., 2022). Penelitian ini juga memasukkan tahun 2020 dan 2021 ke dalam periode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pekerja dengan jenjang Pendidikan mana yang dapat bertahan dan berdampak terhadap kemiskinan meskipun di masa krisis akibat covid-19.

Jenjang Pendidikan dasar pekerja kurang memiliki peran dalam mempengaruhi kemiskinan yang ada di Indonesia, Pendidikan dasar pekerja justru berpengaruh menambah kemiskinan yang ada di Indonesia. Kebijakan serta program nasional yaitu wajib belajar dengan Pendidikan dasar 9 tahun kurang berperan dalam tujuan nasional penanggulangan kemiskinan melalui Pendidikan. Jenjang Pendidikan pekerja di atas 9 tahun dapat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan, jenjang yang dimaksud adalah jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan yang lebih tinggi, tingkat Pendidikan pekerja yang lebih tinggi akan semakin besar pula pengaruhnya dalam mengurangi kemiskinan (Rizal, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenjang Pendidikan pekerja yang mana yang memiliki pengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel tingkat partisipasi dari Angkatan kerja menurut jenjang Pendidikan terakhir pekerja. Hubungan Pendidikan serta kemiskinan dapat dijelaskan melalui jalur tenaga kerja, Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan memberikan pengetahuan sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta menciptakan akses ke lapangan kerja.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan penelitian ini diketahui karena adanya temuan yang berbeda terhadap beberapa variabel terhadap konsep dan hipotesis yang sama seperti yang dilakukan Rizal (2015). Rizal menekankan bahwa Pendidikan dasar (SD, SMP) pekerja tidak berperan dalam mengurangi kemiskinan dan justru menambah kemiskinan. Penelitian ini menemukan hasil sebaliknya dimana Pendidikan pekerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sementara dalam

penelitian ini variabel yang tidak berpengaruh mengurangi kemiskinan adalah pekerja yang tidak sekolah/tidak tamat SD.

Terdapat banyak penelitian tentang pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh (Rizal, 2015). Pada penelitian-penelitian sebelumnya, belum banyak yang memakai variabel tingkat partisipasi dari Angkatan kerja menurut jenjang Pendidikan terakhir pekerja untuk mendefinisikan tingkat kemiskinan yang memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendapatan yang diterima pekerja atau rumah tangga. Indikator-indikator di bidang Pendidikan seperti angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, serta rata-rata lama sekolah lebih banyak digunakan para peneliti sebagai proksi dari variabel Pendidikan. Penelitian (Rizal, 2015) menggunakan 3 variabel jenjang Pendidikan, yaitu pekerja berpendidikan dasar, pekerja berpendidikan menengah, dan pekerja berpendidikan tinggi dan menggunakan periode penelitian 2007-2010. Penelitian ini telah menambahkan variabel pekerja tidak sekolah/tidak tamat SD serta menggunakan periode waktu penelitian 2010-2021 serta menggunakan variabel kontrol uang berbeda.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat Pendidikan pekerja terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan mengolah data panel variabel presentase penduduk miskin, rasio pekerja tidak sekolah/tidak tamat SD terhadap total pekerja, rasio pekerja berpendidikan dasar (SD,SMP) terhadap total pekerja, rasio pekerja berpendidikan menengah (Umum dan Kejuruan) terhadap total pekerja, rasio perkerja berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) terhadap total pekerja, PDRB perkapita, dan Gini Rasio. Data yang digunakan berasal dari BPS. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 bab, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, ringkasan metode penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori dari penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya dan hipotesis dari penelitian ini.

Bab 3: Metode penelitian

Berisi penjelasan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, model empiris yang dipakai dalam penelitian, definisi operasional variabel dalam penelitian, sumber data, serta Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab 4: Pembahasan

Berisi tentang gambaran umum variabel-variabel penelitian yang dilakukan, deskripsi hasil penelitian, analisis dan pembuktian hipotesis penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian ini.

Bab 5: Penutup

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran untuk pemerintah serta penelitian berikutnya.